

# LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN

**SURVEI PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
SEMESTER I TAHUN 2021 PADA  
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI  
KELAS I B**



**TAHUN 2021**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

## **1.4. Rencana Kerja**

### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka – angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data – data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang

dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 6 (bulan) bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Manager Representatif). Manager Representatif akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 1**

**Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas**



**Tabel 1**

**Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Korupsi**

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 2**  
**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi



**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**3.1. Profil Responden**

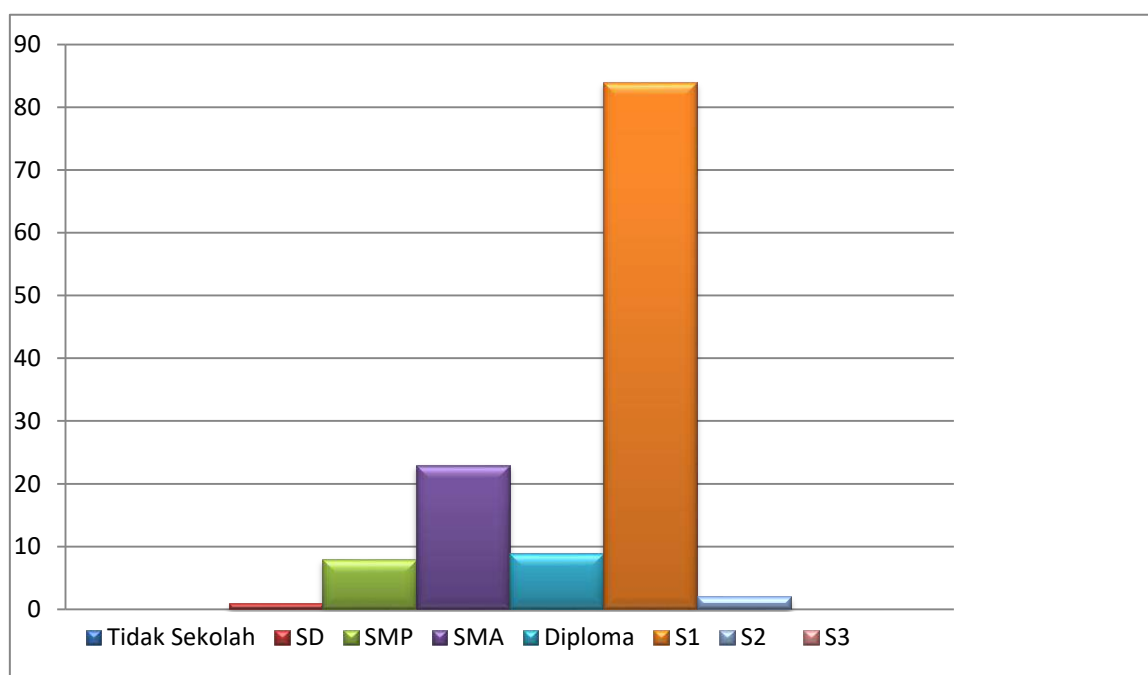
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB mayoritas memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 84 orang (66,14%).

**Tabel 3**  
**Tabel Tingkat Pendidikan Responden**

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	1	0,80
3	SMP/SLTP	8	6,30
4	SMA/SLTA	23	18,11
5	D1/D2/D3/D4	9	7,08
6	S1	84	66,14
7	S2	2	1,57
8	S3	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Tingkat Pendidikan Responden**



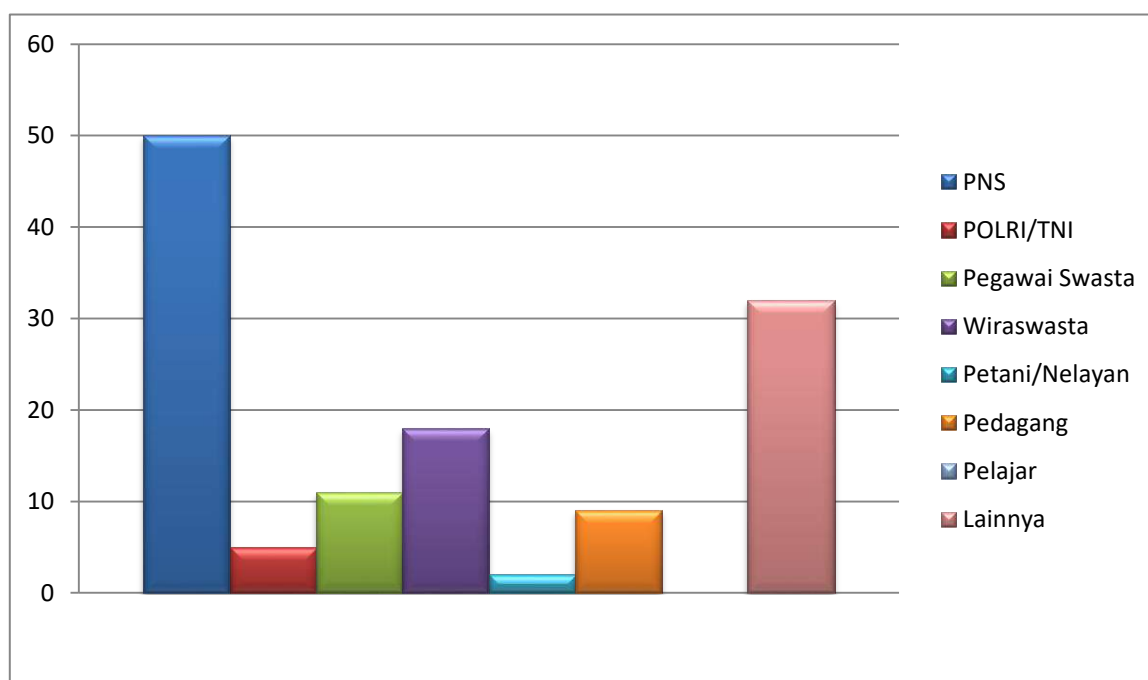
### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 50 orang (39,37%)

**Tabel 4**  
**Tabel Jenis Pekerjaan Responden**

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	PNS	50	39,37
2	POLRI/TNI	5	3,94
3	Pegawai Swasta	11	8,66
4	Wiraswasta	18	14,17
5	Petani/Nelayan	2	1,57
6	Pedagang	9	7,09
7	Pelajar	0	0
8	Lainnya	32	25,20
<b>JUMLAH</b>		<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Jenis Pekerjaan Responden**



### 3.1.3. Kelompok usia responden

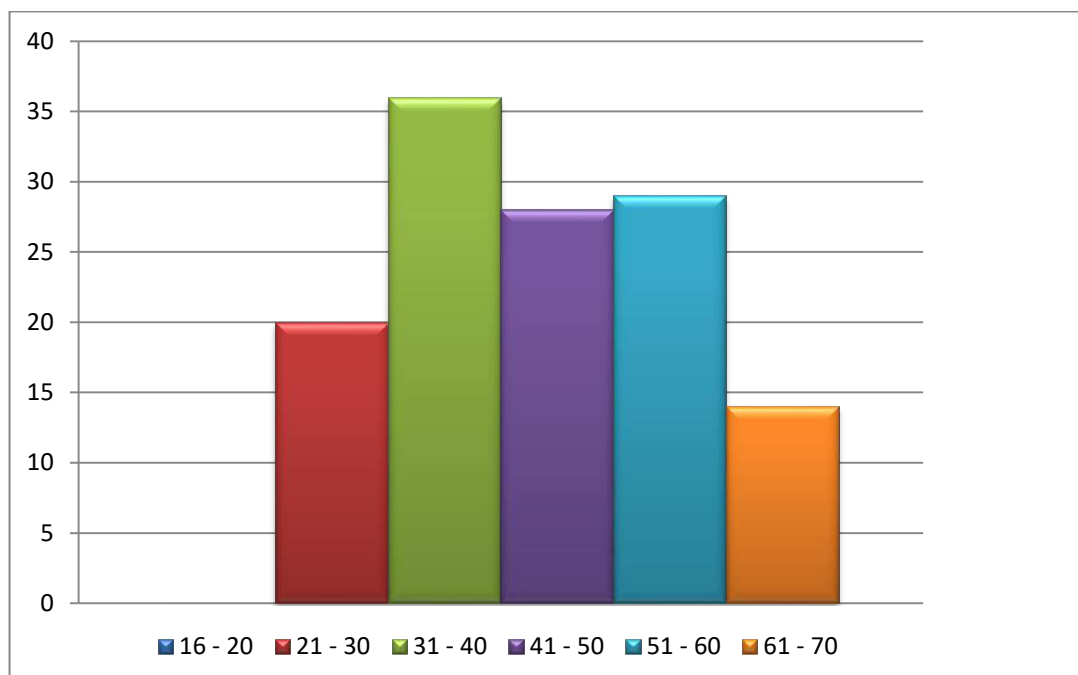
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam

kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 31 tahun s/d 40 tahun sebanyak 36 orang (28,35%). Bagi kelompok usia di atas 60 tahun, jumlah responden semakin mengecil, dan tidak terdapat responden pada kelompok usia di bawah 21 tahun.

**Tabel 5**  
**Tabel Usia Responden**

NO	USIA	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1.	16 – 20 Tahun	0	0
2.	21 – 30 Tahun	20	15,75
3.	31 – 40 Tahun	36	28,35
4.	41 – 50 Tahun	28	22,05
5.	51 – 60 Tahun	29	22,83
6.	61 – 70 Tahun	14	11,02
<b>Jumlah</b>		<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Usia Responden**



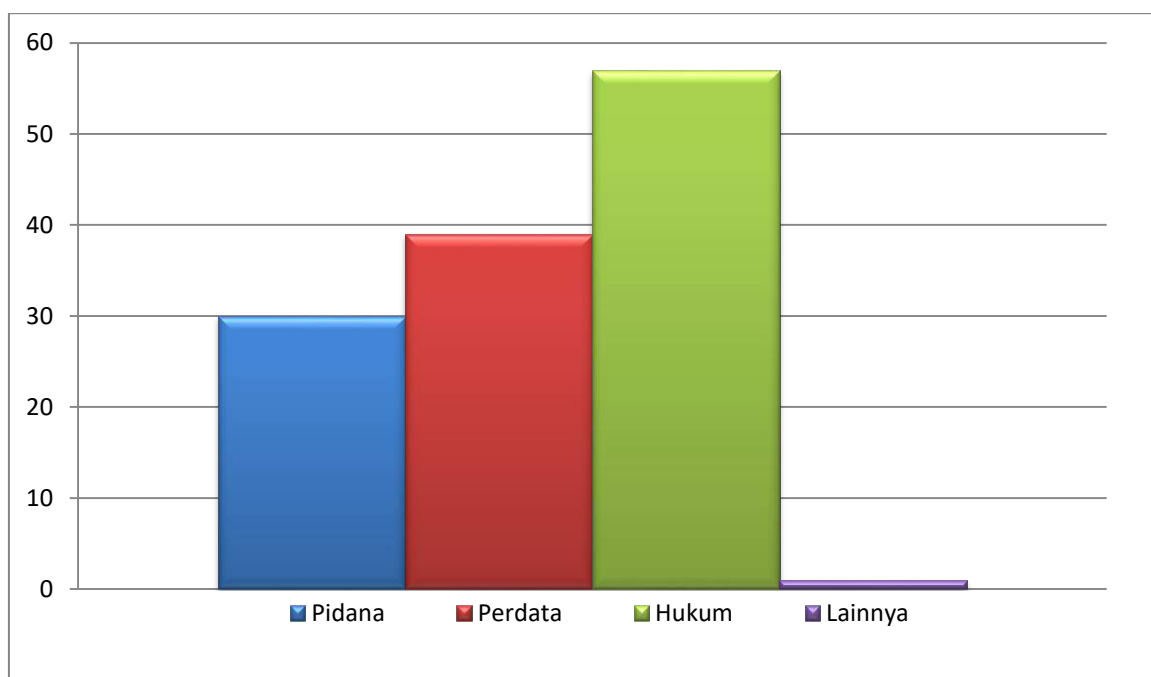
#### 3.1.4. Layanan yang digunakan

Layanan Bagian Kepaniteraan Hukum menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 79 orang (79%).

**Tabel 6**  
**Tabel Jenis Layanan Yang Dipergunakan Responden**

NO	JENIS LAYANAN	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Bagian Kepaniteraan Pidana	30	23,62
2	Bagian Kepaniteraan Perdata	39	30,71
3	Bagian Kepaniteraan Hukum	57	44,88
4	Layanan Lainnya	1	0,79
<b>JUMLAH</b>		<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Jenis Layanan Yang Dipergunakan Responden**



### 3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

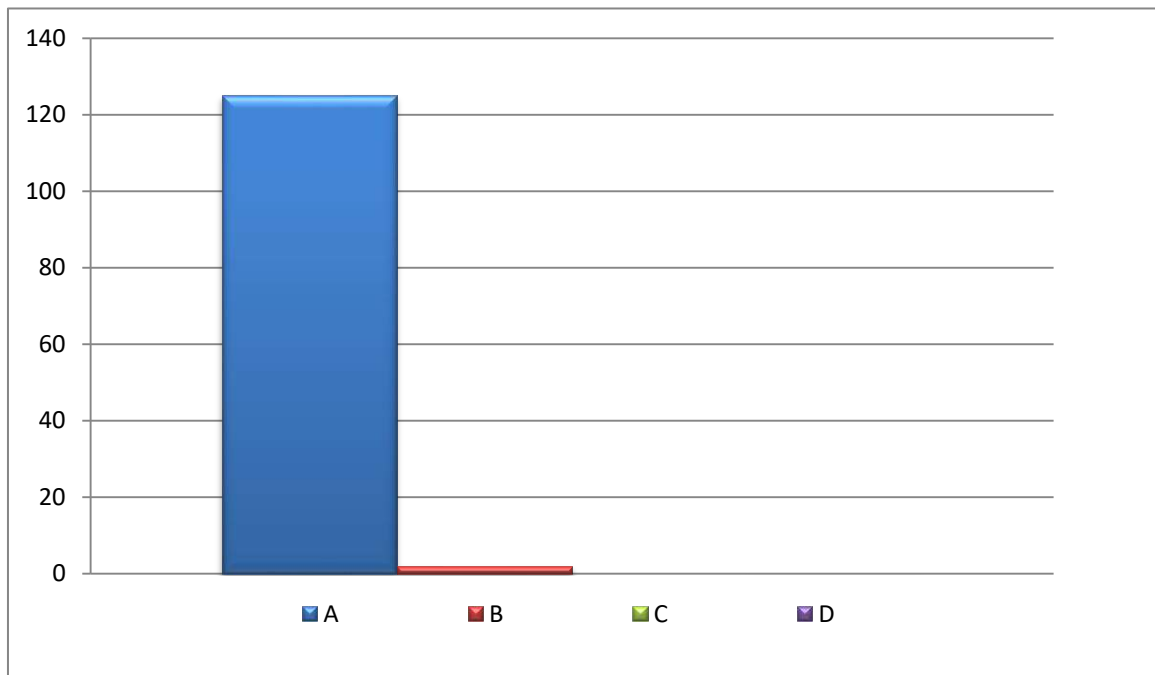
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan “125 (98,42%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu Sesuai Dengan Prosedur (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,98” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB “Bersih dari Korupsi”.

**Tabel 7**

**Tabel Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan**

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu Sesuai Prosedur	A	4	125	98,42
2	Sering Sesuai Prosedur	B	3	2	1,58
3	Jarang Sesuai Prosedur	C	2	0	0
4	Tidak Sesuai Prosedur	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan**



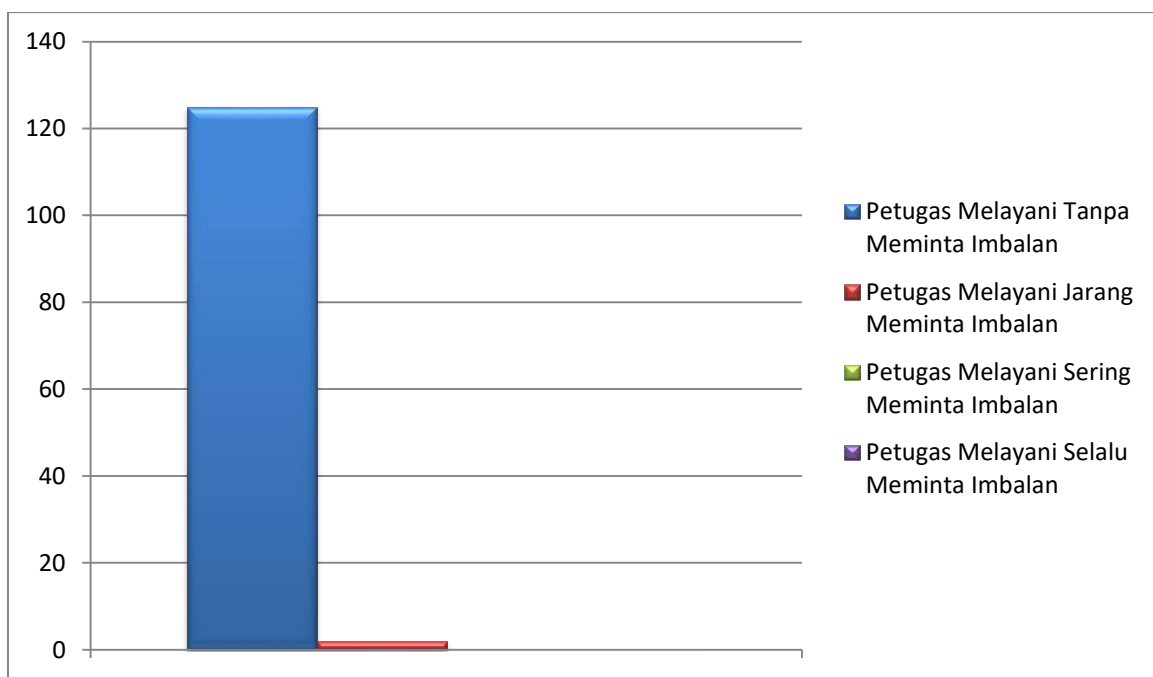
### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan “125 (98,42%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)” pada index rata - rata skor sebesar “3,98” dimana berada pada interval skor 3,26 - 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri TebingTinggi Kelas I B “Bersih dari Korupsi”.

**Tabel 8**  
**Tabel Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan**

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	A	4	125	98,42
2	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	B	3	2	1,58
3	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	C	2	0	0
4	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan**



### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan “125 (98,42%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Tidak Pernah (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,98” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat

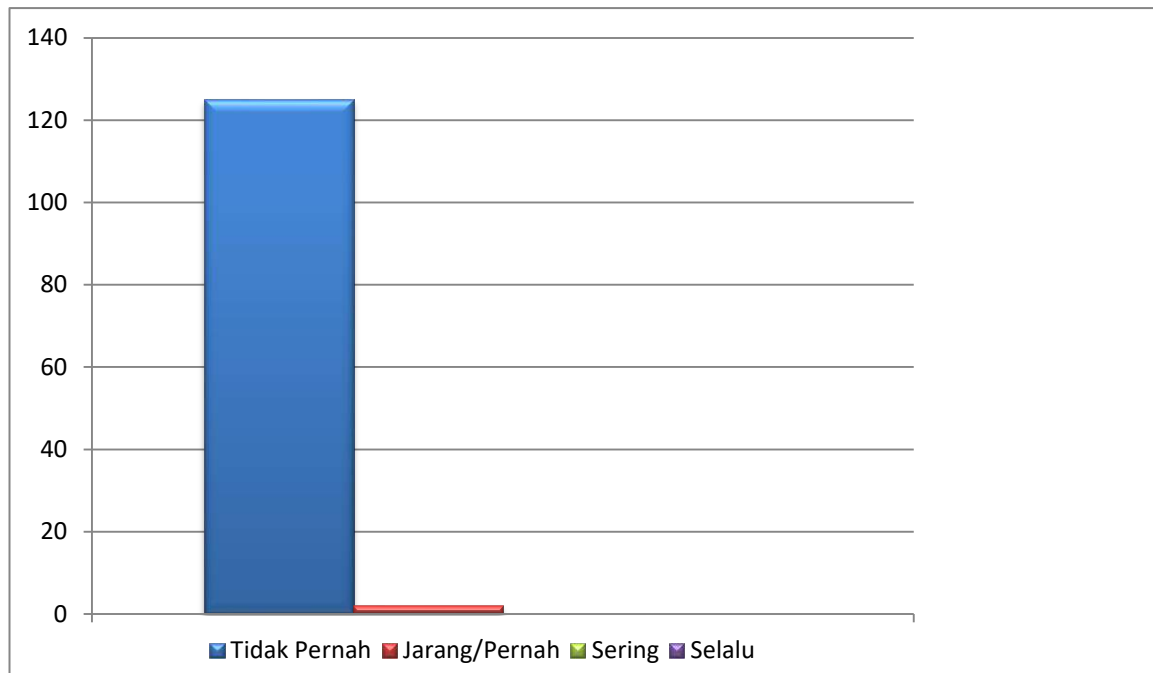
diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B “Bersih dari Korupsi”.

**Tabel 9**

**Tabel Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh**

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	125	98,42
2	Jarang/Pernah	B	3	2	1,58
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh**



#### 3.2.4. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan “124 (97,64%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,97” dimana berada pada interval skor 3,26 - 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B “Bersih dari Korupsi”.

**Tabel 10**

**Tabel Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia**

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	124	97,64
2	Jarang/Pernah	B	3	3	2,36
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya**



### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

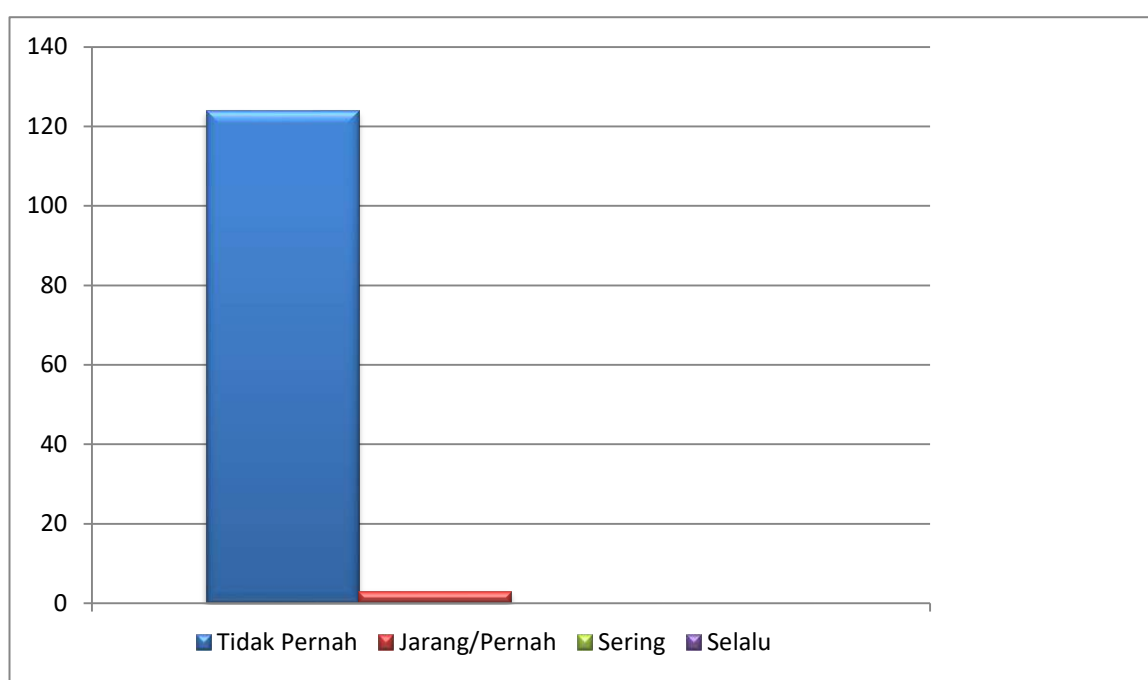
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan “124 (97,64%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,97” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B “Bersih dari Korupsi”.



**Tabel 11**  
**Tabel Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan**

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	124	97,64
2	Jarang/Pernah	B	3	3	2,36
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>100</b>	<b>100</b>

**Grafik Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan**



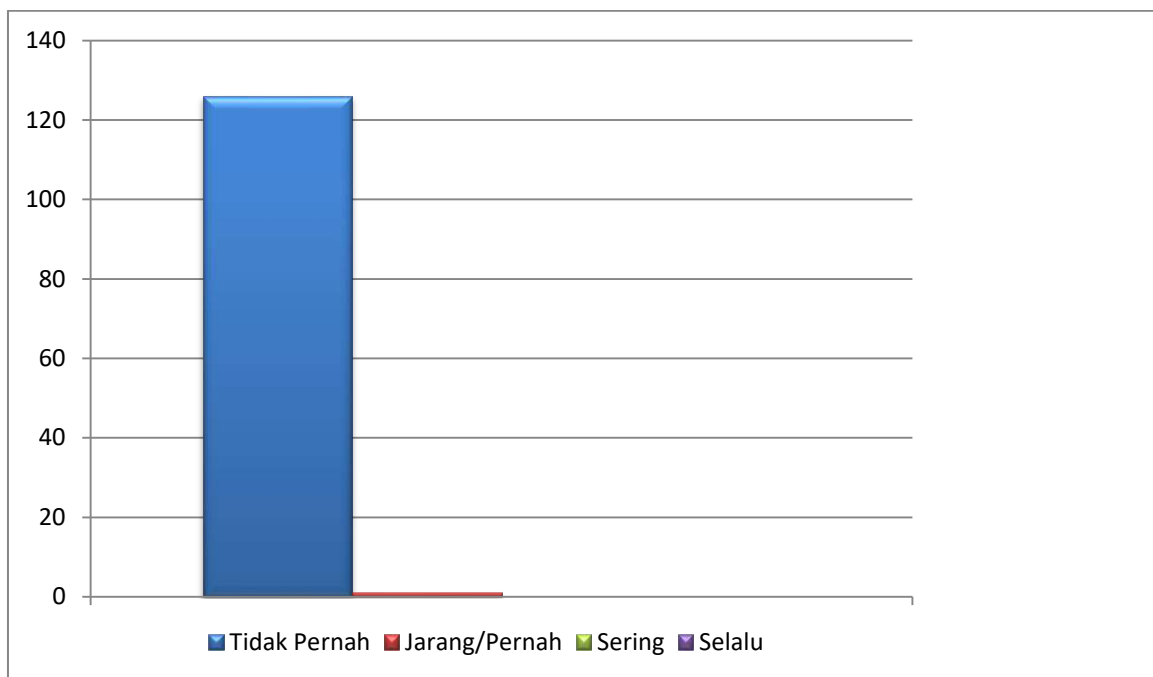
### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan “126 (99,21%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Tidak Pernah (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,99” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B “Bersih dari Korupsi”.

**Tabel 12**  
**Tabel Indeks Pada Indikator Hadiah**

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	126	99,21
2	Jarang/Pernah	B	3	1	0,79
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Indeks Pada Indikator Hadiah**



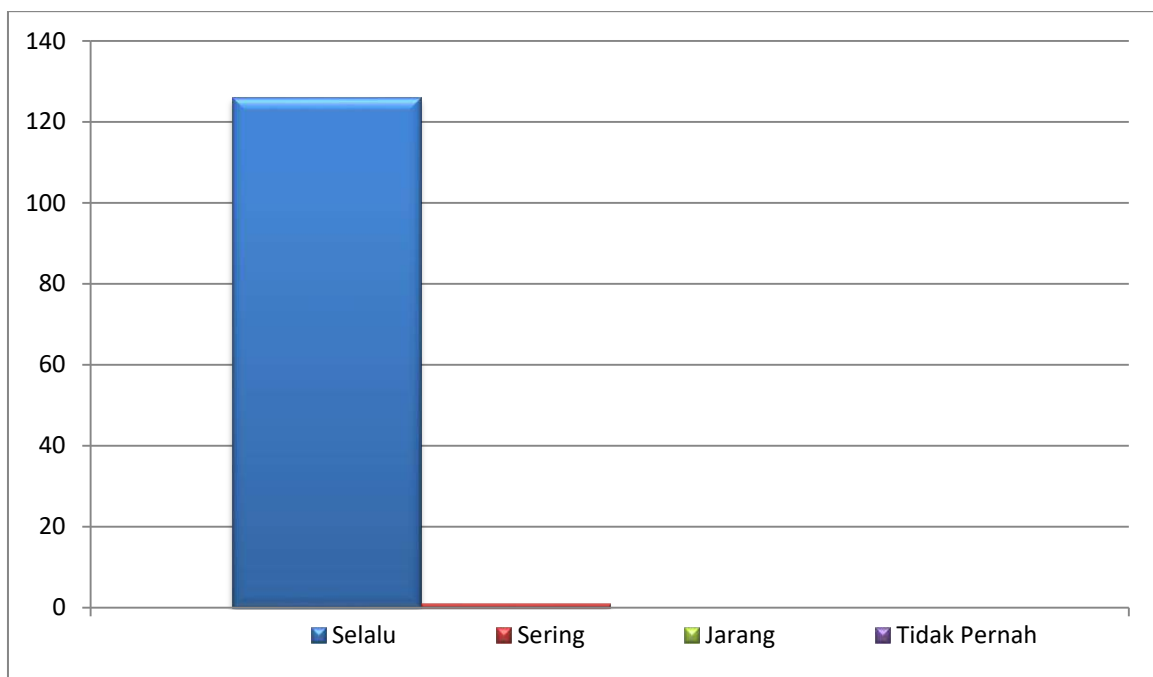
### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan “126 (99,21%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Selalu (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,99” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B “Bersih dari Korupsi”.

**Tabel 13**  
**Tabel Indeks Pada Transparansi Biaya**

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	126	99,21
2	Sering	B	3	1	0,79
3	Jarang	C	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Indeks Pada Transparansi Biaya**



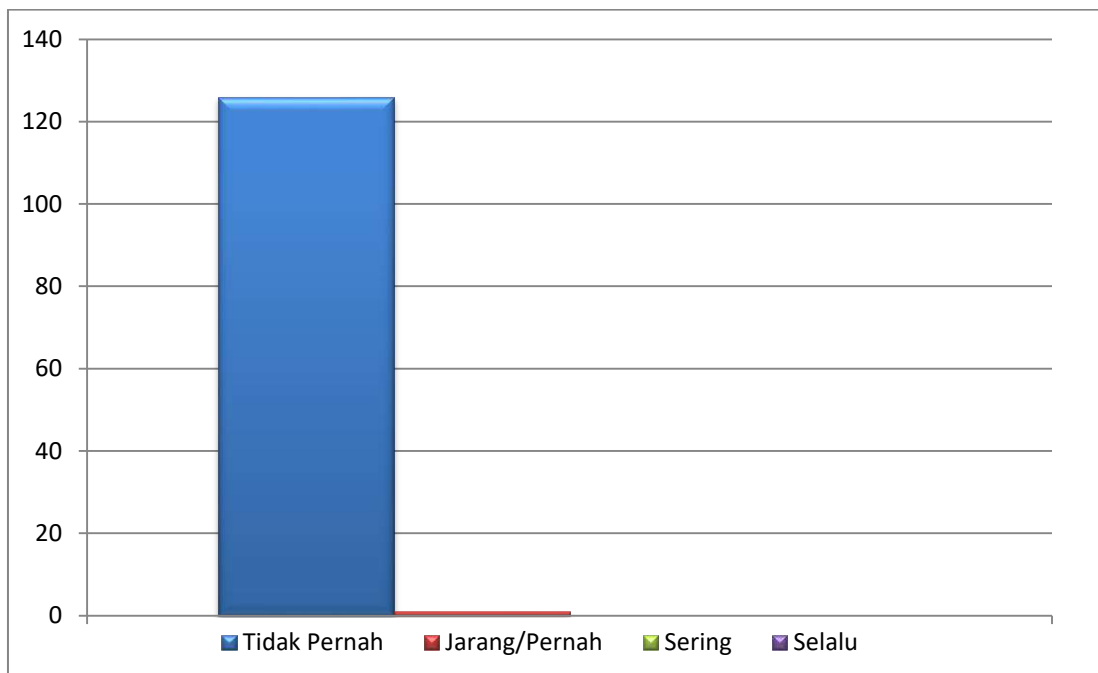
### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan Pembayaran ini menunjukkan hasil analisis perolehan “126 (99,21%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Tidak Pernah (A)” pada index rata - rata skor sebesar “3,99” dimana berada pada interval skor 3,26 - 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B “Bersih dari Korupsi”.

**Tabel 14**  
**Tabel Indeks Pada Indikator Percaloan**

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	126	99,21
2	Jarang/Pernah	B	3	1	0,79
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Indeks Pada Indikator Percaloan**



### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil analisis perolehan “126 (99,21%)” dari jumlah responden memilih jawaban “Tidak Pernah (A)” pada index rata – rata skor sebesar “3,99” dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B “Bersih dari

Korupsi”.

**Tabel 15**

**Tabel Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang**

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Pernah	A	4	126	99,21
2	Jarang/Pernah	B	3	1	0,79
3	Sering	C	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
<b>JUMLAH</b>				<b>127</b>	<b>100</b>

**Grafik Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang**



### **3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB sebesar 3,762 dan setelah dikonversikan menjadi sebesar 94,05

**Tabel 16**  
**Tabel Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja**  
**Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B**

NO	RUANG LINGKUP	SKOR RATA - RATA	SKOR RATA - RATA TERTIMBANG	KATEGORI
1	Manipulasi Peraturan	3,98	0,4378	Bersih dari korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,98	0,4378	Bersih dari korupsi
3	Menjual Pengaruh	3,98	0,4378	Bersih dari korupsi
4	Transaksi Rahasia	3,97	0,4367	Bersih dari korupsi
5	Biaya Tambahan	3,97	0,4367	Bersih dari korupsi
6	Hadiah	3,99	0,4389	Bersih dari korupsi
7	Transparansi Biaya	3,99	0,4389	Bersih dari korupsi
8	Percaloan	3,99	0,4389	Bersih dari korupsi
9	Perbuatan Curang	3,99	0,4389	Bersih dari korupsi
<b>Jumlah Skor Rata - Rata Tertimbang</b>			<b>3.9</b>	
			<b>42</b>	
			<b>4</b>	
<b>IPK</b>			<b>3.9424 x 25 = 98,56</b>	

Indeks 98,56 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan “BERSIH DARI KORUPSI”. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00

**Tabel 17**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja**  
**Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B**

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

#### **3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan**  
**Satuan Kerja pada pengadilan**

<b>No</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan</b>
1	Lebih di tingkatkan pelayanan di PN Tebing Tinggi
2	-
3	-
4	-
5	-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B memiliki Indeks Persepsi Korupsi sebesar 3,9424 dan setelah dikonversikan menjadi sebesar 98,56 atau masuk pada kategori “BERSIH DARI KORUPSI”.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,98 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,98 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,98 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,97 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,97 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,99 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,99 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,99 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,99 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB Tahun 2020 Semester II tersebut di atas, menunjukkan bahwa mutu kinerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB sudah tergolong baik. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator yakni indikator Transaksi Rahasia dengan indeks 3,97 dengan kategori “Bersih Dari Korupsi”, dan indikator Biaya Tambahan dengan indeks 3,97 dengan kategori “Bersih



Dari Korupsi” memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Dalam hal ini, perlu adanya peningkatan mutu kinerja pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB sehingga terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.